

## ANGGARAN RP1 MILIAR DISIAPKAN UNTUK NORMALISASI DRAINASE KENDARI GUNA MENGATASI BANJIR



Sumber gambar: [https://sultratop.com/wp-content/uploads/2025/01/PSX\\_1229.jpg](https://sultratop.com/wp-content/uploads/2025/01/PSX_1229.jpg)

SULTRATOP.COM, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran Rp1 miliar untuk menormalisasi drainase guna mengatasi banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah. Kepala Dinas PUPR Kota Kendari, Erlis Sadya Kencana, mengungkapkan bahwa banjir di Kendari disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk air laut pasang dan sedimentasi lumpur. Menurutnya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Kendari, tetapi juga di daerah lain seperti Kabupaten Konawe dan Konawe Utara. “Banjir ini dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya air pasang, saluran drainase, dan sedimentasi lumpur. Setiap tahun, kami rutin melakukan pengerukan untuk mengurangi dampak pendangkalan dan penyumbatan drainase,” kata Erlis kepada awak media, Rabu (5/2/2025).

Erlis menjelaskan, penyumbang terbesar sedimentasi lumpur di Kendari berasal dari daerah ketinggian, seperti di Kecamatan Puuwatu, yang membawa lumpur hingga ke wilayah Kelurahan Korumba dan sekitarnya. Selain itu, intensitas hujan yang tinggi turut memperparah kondisi banjir di beberapa titik kota. Menanggapi anggapan bahwa pembangunan pedestrian di kawasan Eks-MTQ tidak memperhatikan drainase, Erlis membantah hal tersebut. “Saya rasa itu tidak benar. Kami ini warga Kota Kendari, tentu tidak mungkin mencelakakan diri sendiri,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, normalisasi saluran drainase dan beberapa kanal di kawasan MTQ membutuhkan anggaran sekitar Rp1 miliar. Ia juga menyoroti pentingnya penghijauan kembali lahan yang telah dibuka, baik oleh individu maupun perusahaan, untuk mengurangi sedimentasi lumpur yang masuk ke drainase. “Harus ada tangkapan lumpur di daerah hulu atau wilayah ketinggian agar lumpur tidak masuk ke drainase dan

menyebabkan banjir berulang. Selain itu, masyarakat juga harus memahami bahwa membangun rumah di tepi sungai dapat menghambat penanganan banjir, karena alat berat sulit masuk ke lokasi,” jelasnya. Erlis menegaskan bahwa penanganan banjir membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. “Jika tidak ada sinergi dalam pembangunan, maka keberhasilan sulit dicapai bersama,” pungkasnya. (B/ST)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultratop.com/anggaran-rp1-miliar-disiapkan-untuk-normalisasi-drainase-kendari-guna-mengatasi-banjir/>, “Anggaran Rp1 Miliar Disiapkan untuk Normalisasi Drainase Kendari Guna Mengatasi Banjir”, 05 Februari 2025
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/494773/pemkot-kemdari-anggarkan-rp1-miliar-untuk-mitigasi-banjir>, “Pemkot Kendari anggarkan Rp1 miliar untuk mitigasi banjir”, 06 Februari 2025

#### **Catatan:**

1. Dengan adanya normalisasi drainase yang dibangun oleh pemerintah setempat, dapat mengatasi banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah:
  - a. Pasal 1
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
    - 2) ayat (5) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.